

**PENGARUH *CORPORATE*
GOVERNANCE DAN KARAKTER EKSEKUTIF
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA**

SKRIPSI



**Oleh:
Zellika Siswindya Putri
160810240**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**PENGARUH *CORPORATE*
GOVERNANCE DAN KARAKTER EKSEKUTIF
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Zellika Siswindya Putri
160810240**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Zellika Siswindya Putri
NPM/NIP : 160810240
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

Pengaruh Corporate Governance dan Karakter Eksekutif terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 29 Juli 2022



Zellika Siswindya Putri
160810240

**PENGARUH *CORPORATE*
GOVERNANCE DAN KARAKTER EKSEKUTIF
TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA PERUSAHAAN
YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Zellika Siswindya Putri
160810240**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 29 Juli 2022



**Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI.
Pembimbing**

ABSTRAK

Sektor pajak merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara berupa pembangunan dan biaya nasional. Pajak merupakan iuran wajib yang sifatnya memaksa setiap orang atau badan kepada suatu negara. Hal ini didasarkan pada aturan tanpa mendapat timbal balik dan digunakan untuk kebutuhan negara, terutama untuk kemakmuran masyarakat. Perusahaan berusaha untuk meminimalkan pajak dengan alasan utama untuk mengoptimalkan keuntungan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, dan agar perusahaan dapat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kepada pemerintah yang merupakan salah satu pemegang saham perusahaan. Tugas seorang eksekutif perusahaan adalah sebagai penggerak proses kegiatan di dalam perusahaan. Penghindaran pajak ini menimbulkan stigma negatif, sehingga pelaku usaha akan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Desain penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, karena menggambarkan variabel yang diteliti dan membuktikan hubungan antar variabel yang diteliti. Periode pengamatan tahun 2017-2021. Penelitian ini menemukan bahwa variabel karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu penghindaran pajak. Sedangkan *corporate governance* mendapatkan hasil positif signifikan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Corporate Governance*, Karakter Eksekutif, *Tax Avoidance*

ABSTRACT

The tax sector is the largest contributor to state revenues in the form of development and national cost. Tax is a mandatory contribution that has the nature of forcing each individual or entity to a country. This is based on rules without getting reciprocity and is used for the needs of the state, especially for the prosperity of the community. The company tries to minimize taxes with the main reason being to optimize the profits to increase the company's competitiveness, and so that the company can fulfill its obligations as a tax payer to the government which is one of the company's shareholders. The task of a company executive is as a driver of the process of activities within the company. This tax avoidance creates a negative stigma, so that businesses will gain legitimacy from the community and other stakeholders. The design of this research is a quantitative approach with a descriptive and verification approach, because it describes the variables studied and proves the relationship between the variables studied. Observation period in 2017-2021. This study is a quantitative study because the data obtained are in the form of numbers and the tested by data analysis. This study finds that the characteristics of executives variable has no influence on the dependent variable, namely tax avoidance. Corporate governance who get significant positive results on the dependent variable, namely tax avoidance.

Keywords : Corporate Governance, Executive Character, Tax Avoidance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari beberapa pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Pembimbing Skripsi Studi Akuntansi, dan Dosen Pembimbing Akademik Universitas Putera Batam.
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
5. Ibu Indra Novita selaku P.H. Kepala Kantor PT Bursa Efek Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau.
6. Ibu Sri Oktabriyani selaku staff PT Bursa Efek Indonesia.
7. Bapak Nono Gegery Mulder dan Ibu Kuswinarni selaku Orang Tua yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
8. Sahabat terbaik yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi penulis.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu melimpahkan berkat dan anugerah-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Batam, 29 Juli 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Zellika Siswindya Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR RUMUS	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Teori Dasar Penelitian.....	10
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	10
2.1.2 <i>Signaling Theory</i>	12
2.2 Teori Variabel.....	13
2.2.1 <i>Tax Avoidance</i>	13
2.2.2 <i>Corporate Governance</i>	14
2.2.2.1 <i>Pengertian Corporate Governance</i>	14
2.2.2.2 <i>Prinsip-prinsip Good Corporate Governance</i>	15
2.2.2.3 <i>Tujuan Penerapan Good Corporate Governance</i>	17
2.2.2.4 <i>Teori-teori yang Berhubungan dengan Corporate Governance</i>	18
2.2.3 <i>Karakteristik Eksekutif</i>	19
2.3 <i>Penelitian Terdahulu</i>	21

2.4	Kerangka Pemikiran	27
2.5	Hipotesis penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Desain Penelitian	29
3.2	Operasional Variabel	30
3.2.1	Variabel Bebas (<i>Independen Variable</i>).....	30
3.2.1.1	<i>Corporate Governance</i> (X1)	30
3.2.1.2	Karakteristik Eksekutif (X2)	31
3.2.2	Variabel Terikat (<i>Dependen Variable</i>)	32
3.3	Populasi dan Sampel	35
3.3.1	Populasi	35
3.3.2	Sampel.....	36
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5	Metode Analisis Data.....	38
3.5.1	Statistik Deskriptif	39
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	39
3.5.3	Analisis Linier Berganda	40
3.5.4	Uji Hipotesis.....	41
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		44
4.1	Hasil Penelitian.....	44
4.1.1	Hasil Uji Stastistik Deskriptif.....	44
4.1.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	45
4.1.2.1	Hasil Uji Normalitas	45
4.1.2.2	Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
4.1.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	48
4.1.2.4	Hasil Uji Autokorelasi	49
4.1.3	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	50
4.1.4	Hasil Uji Koefisien Determinasi	50
4.1.5	Hasil Uji Hipotesis.....	51
4.1.5.1	Hasil Uji T (Uji Parsial)	51
4.1.5.2	Hasil Uji F (Uji Simultan).....	52

4.2	Pembahasan.....	53
4.2.1	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	53
4.2.2	Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	54
4.2.3	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	55
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		56
5.1	Simpulan	56
5.2	Saran	57
DAFTAR PUSTAKA		58
Lampiran 1 Tabulasi Data		61
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....		62
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian		63
Lampiran 4 Surat Balasan Penelitian		64
Lampiran 5 Hasil Turnitin		65
Lampiran 6 Persetujuan Dosen Pembimbing		65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	27
Gambar 3.1 Desain Penelitian	29
Gambar 4.1 Grafik Histogram	45
Gambar 4.2 Grafik Normal <i>P-Plot</i>	46
Gambar 4.3 Grafik Heteroskedastisitas	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Pendapatan Negara dari Tahun 2015 - 2019	1
Tabel 3.1 Operasional Variabel	32
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian	43
Tabel 4.1 Uji Statistik Deskriptif	44
Tabel 4.2 <i>One Sample Komogrov-Smirnov Test</i>	47
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi	49
Tabel 4.5 Analisis Regresi Linier Berganda	50
Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi	51
Tabel 4.7 Uji T (Uji Parsial)	52
Tabel 4.8 Uji F (Uji Simultan)	53

DAFTAR RUMUS

	Halaman
Rumus 3.1 Komisaris Independen	31
Rumus 3.2 <i>RISK</i>	31
Rumus 3.3 <i>Cash Effective Tax Rate</i>	32
Rumus 3.4 Analisis Regresi Linier Berganda	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sektor pajak ialah pemberi kontribusi terbesar dalam penerimaan negara dalam bentuk pembangunan dan biaya nasional. Pajak ialah kontribusi wajib yang memiliki sifat memaksa setiap individu atau badan kepada suatu negara. Hal ini berlandaskan aturan dengan tidak memperoleh timbal balik dan dipergunakan untuk keperluan negara khususnya untuk kemakmuran masyarakat. Pajak ini adalah sumber pemasukan paling besar bagi suatu negara.

Tabel 1.1 Data Pendapatan Negara dari tahun 2015 sampai 2019 (dalam triliyun Rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	PNBP	Hibah	Total
2015	1.201,7	558,6	3,3	1.793,6
2016	1.546,7	273,8	2,0	1.822,5
2017	1.498,9	250,0	1,4	1.750,3
2018	1.618,1	275,4	1,2	1.894,7
2019	1.786,4	378,3	0,4	2.165,1

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Informasi diatas, menunjukkan sumber pemasukan negara yang terbesar dari pajak. Penerimaan pajak negara pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami

kenaikan tiap tahun nya dan pada tahun 2019 mencapai 1.786,4 triliyun rupiah dari total uang masuk negara sebanyak 2.165,1 triliyun rupiah.

Pajak berperan dalam membangun ekonomi negara lewat adanya pembangunan infrastruktur, contohnya: jalan, rumah sakit, jembatan, dan masih banyak lagi. Pajak tersebut dipergunakan guna biaya negara dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakatnya, memberikan subsidi kebutuhan masyarakat sampai membayar hutang negara. Selain itu fungsi *budgetair*, fungsi dari pajak juga sebagai redistribusi uang masuk dari masyarakat yang kemampuan ekonominya tingkat atas kepada masyarakat yang kemampuan ekonominya tingkat bawah. Redistribusi pendapatan dipergunakan untuk meratakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, misalnya fasilitas umum bagi masyarakat dan memberikan subsidi bagi golongan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah atau kurang mampu.

Pajak merupakan kewajiban setiap individu masyarakat kepada negaranya sebagai bentuk partisipasinya dalam membangun negara. Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran dari masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Djajadiningrat menjelaskan definisi pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan oleh suatu situasi, kejadian, dan tindakan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebagai hukuman, berdasarkan peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik

dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Lubis, Suryani, & Anggraeni, 2018).

Penerimaan pajak di Indonesia masih menggunakan basis pajak yang sangat terbatas dikarenakan jumlah individu atau badan membayar pajak masih sedikit. Ada dua pandangan tentang penghindaran pajak, ialah yang legal dan ilegal. Penggelapan pajak merupakan salah satu upaya memerangi perpajakan sebagai kendala yang terjadi atau ada dalam pemungutan pajak (Okrayanti, Utomo, & Nuraina, 2017). Pengertian penghindaran pajak ini menjelaskan bahwa perusahaan dapat mengurangi beban pajaknya dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan dengan mengatur pengelolaan keuangan. Langkah-langkah pengurangan pajak berasal dari peluang yang dapat dipergunakan, baik dari kelemahan hukum maupun dari sumber daya manusia (Saputra, 2017). Perbedaan kedua adalah dari segi hukum, dimana penggelapan pajak dianggap sebagai upaya administrasi perpajakan yang sah dikarenakan mempergunakan celah dalam aturan pajak yang ada, sementara penyelundupan pajak memiliki banyak keuntungan. Berbagai kepentingan fiskus yang menginginkan penerima pajak yang besar dan berkelanjutan bertentangan dengan keperluan perusahaan yang ingin membayar pajak yang minimal. Perbedaan antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah, pajak kepada negara merupakan sumber pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi sebaliknya untuk pajak badan merupakan pungutan yang mempengaruhi pemerintah, keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan perusahaan berusaha guna meminimalkan bayar pajak, baik yang ilegal maupun yang legal. Situasi seperti ini bisa terjadi

jika ada celah peluang yang bisa dipergunakan karena lemahnya regulasi perpajakan yang berujung pada anti pajak (Afifah & Prastiwi, 2019).

Perusahaan berusaha meminimalisir pajak dengan alasan utama untuk mengoptimalkan keuntungan yang diperoleh untuk meningkatkan daya saing perusahaan, serta supaya perusahaan dapat memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak kepada pemerintah yang dimana ialah salah satu pemegang saham perusahaan. Jabatan eksekutif dalam sebuah perusahaan menjabat posisi pemimpin dalam perusahaan tersebut. Tugas dari seorang eksekutif perusahaan ialah sebagai penggerak dari proses kegiatan didalam perusahaan. Didalam pengelolaannya, eksekutif perusahaan dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam yaitu tingkah dan watak yang menggambarkan karakter eksekutif dan faktor dari luar.

Pada penelitian ini meneliti pengaruh antara karakter eksekutif terhadap keputusan penghindaran pajak perusahaan. Menghindari pajak banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan mempergunakan perbedaan peraturan dalam menghitung keuntungan baik berdasarkan peraturan komersial dan peraturan pajak. Adanya biaya dan pemasukan yang berbeda dimanfaatkan oleh perusahaan guna mencari celah dalam mengatur nominal pajak yang akan dibayarkan dengan nominal seminim mungkin. Selaras dengan studi yang dilakukan oleh (Meilia & Adnan, 2017) dengan hasil penelitian didapati pengaruh antara karakteristik eksekutif terhadap penghindaran pajak.

Sebagian besar masyarakat melihat upaya penghindaran pajak yang diupayakan perusahaan menyebabkan kerugian besar. Perusahaan yang ikut serta

dalam kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan membayar pajak. Namun kenyataan dilapangan perusahaan menganggap dengan menghindari pajak memberikan keuntungan ekonomis bagi perusahaan. Penghindaran pajak ini menimbulkan stigma negatif, sehingga bisnis akan memperoleh legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kasus ini tidak tepat dengan teori legitimasi yang berlaku bagi setiap perusahaan yang dimana setiap perusahaan menginginkan kemajuan berkelanjutan maka harus memperoleh pengakuan positif dari masyarakat dan pemangku kepentingan perusahaan.

Penelitian tentang *corporate governance* dalam penghindaran pajak ini menarik sebab menerangkan bagaimana *corporate governance* memiliki peranan dalam kepatuhan pajak. Penelitian (Saputra, 2017) menunjukkan bahwa wali independen memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Lebih lanjut, studi yang dilakukan oleh (Alifianti H. P. & Chariri, 2017) menjelaskan bahwa komisaris independen tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengujian terkait pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Berlandaskan uraian penjelasan diatas dengan dukungan hasil studi sebelumnya menjadi dasar pengajuan penelitian ini. Adapun judul studi ini yakni **“Pengaruh *Corporate Governance* Dan Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan terurai, terdapat identifikasi masalah pada studi ini:

1. Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh karakter eksekutif, dimana seorang eksekutif perusahaan yang memiliki ciri pengambil risiko memiliki kecenderungan lebih besar menjadi pelaku penghindar pajak.
2. Diduga ada hubungan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak, karena semakin banyak kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan lain dan kinerja perusahaan akan cenderung dipantau dengan cara mendorong manajemen perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar.
3. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik akan menciptakan kualitas audit yang semakin baik sehingga akan semakin sulit untuk mengupayakan penghindaran pajak.
4. Diduga semakin tinggi jumlah dewan komisaris independen akan semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
5. Komite audit diduga berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena para anggota akan lebih mengerti celah dalam peraturan perpajakan sehingga mampu memberikan saran untuk melakukan penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Beberapa poin identifikasi masalah, maka pembahasan masalah dalam studi ini akan dibatasi sebagai berikut :

1. Peneliti hanya akan mengambil dua variabel independen dalam studi ini, yaitu *Corporate Governance* yang diproksikan sebagai Komisaris Independen dan Karakter Eksekutif.
2. Objek pada penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur sub sector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Penelitian ini memakai data dari tahun 2017-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan pada studi ini, ialah:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan latar belakang yang sudah penulis sajikan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini antara lain:

1. Untuk menganalisa pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisa pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu memverifikasi teori yang telah ada dan memberikan bukti pengaruh Komisaris Independen dan Karakter Eksekutif terhadap penghindaran pajak.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Akademik

Diharapkan studi ini dapat menambah informasi perihal pengaruh *corporate governance* dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak, serta menjadi bahan untuk studi selanjutnya.

2. Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan penyadaran perusahaan penghindar pajak guna mengambil keputusan yang tepat mengenai penghindaran pajak supaya tidak merugikan negara.

3. Bagi investor

Diharapkan menjadi bahan pertimbangan guna menilai kecenderungan penghindaran pajak dalam suatu perusahaan jika dilihat dari sisi komisaris independen dan karakter eksekutifnya.

4. Bagi penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai ilmu perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 *Agency Theory*

(Darmawan, 2019) mengungkapkan teori keagenan ialah teori yang timbul karena aktivitas bisnis yang tidak selalu dikelola langsung oleh pemiliknya dan manajemen dipercayakan kepada agen. Pemilik entitas meminta auditor laporan keuangan melakukan pemeriksaan kelayakan laporan keuangan agen kepada si pemilik perusahaan. Teori ini sangat penting untuk pertumbuhan pasar modal global, sehingga pejabat juga diharuskan untuk mengambil tanggung jawab keuangan yang dituangkan dalam laporan laba rugi dan untuk memberikan opini publik, tanpa pengecualian terhadap laporan audit. Selain itu, agen diharuskan oleh standar akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan secara keseluruhan (prinsip pengungkapan penuh), dan persaingan di antara saham yang beredar di pasar modal juga membantu unit pelaporan keuangan mencapai transparansi, secara sukarela menguntungkan unit pelaporan keuangan (mendukung prinsip keterbukaan informasi sukarela).

Teori agen teori simetri informasi, teori penerapan teori informasi orang dalam, teori tata kelola perusahaan yang baik dalam teori kecurangan akuntansi secara umum. Proporsi kepemilikan hanya sebagian kecil dari saham perusahaan, bahkan kepemilikan saham perusahaan yang dikelola oleh agen membuat

keagenan. Teori keagenan diperluas ke tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan selain pemegang saham.

Pertumbuhan pelaporan konsolidasi di kalangan akuntansi Eropa memperkuat posisi pelaporan keberlanjutan untuk memastikan kelangsungan bisnis, karena saham yang beredar atau ditawarkan kepada publik akan menjadi investor, calon investor dan pemangku kepentingan lainnya tidak lebih menerima investor. Dana Pendidikan Lingkungan mengembangkan gagasan Pelaporan Keuangan dan Pedoman Pelaporan Keberlanjutan dalam laporan konsolidasi tentang kondisi yang baru-baru ini menerima sedikit dukungan secara global. Standar Pelaporan Keuangan Internasional sebagian besar tetap tidak berubah, mereka tidak benar-benar ingin memasukkan pertanyaan tentang tanggung jawab lingkungan dalam komponen laporan keuangan atau setidaknya secara jelas mendefinisikan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengaturan agen yang bertanggung jawab kepada pemegang saham perusahaan, yang memilih atau menunjuk mereka untuk mencapai tujuan menambah kekayaan bagi investor dengan memaksimalkan keuntungan, adalah yang utama dan kemudian menjadi moral utama dealer. Agen yang peduli dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan mengorbankan tujuan kontrak kerja mereka melanggar kontrak karena tidak etis (Darmawan, 2019).

Teori keagenan mengemukakan bahwa setiap pihak didorong oleh kepentingan sendiri, sehingga memunculkan konflik antara agen dan prinsipal. Dengan adanya dua kepentingan yang berbeda dalam sebuah bisnis dimana setiap pihak sama-sama berusaha untuk tetap mendapatkan keuntungan dan masalah

keagenan yang sering muncul dapat diistilahkan sebagai konflik keagenan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan konflik keagenan, perlu adanya pengungkapan informasi bisnis secara sukarela sebagai tanda pertanggungjawaban manajemen kepada investor.

2.1.2 Signaling Theory

(Darmawan, 2019) mengungkapkan bahwa *signaling theory* sama rendahnya dengan *agency theory*. *Signaling theory* ini menjelaskan manajemen perusahaan dengan informasi yang lebih baik tentang perusahaan akan terdorong untuk memberikan informasi ini kepada calon investor, kemampuan untuk menaikkan harga saham perusahaan. Hal positif mengenai teori sinyal ialah bahwa perusahaan yang menyampaikan kabar baik membedakan mereka dari perusahaan yang tidak dengan menginformasikan pasar tentang status mereka, menandakan kinerja masa depan yang baik. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk di masa lalu, akan kehilangan kepercayaan pasar. Para pemimpin seringkali memiliki insentif untuk mengomunikasikan informasi yang baik tentang perusahaan mereka kepada publik secepat mungkin, seperti melalui konferensi pers. Namun, pihak di luar perusahaan tidak mengetahui keaslian informasi yang disajikan. Apabila regulator memberikan signal yang meyakinkan, yang akan mempengaruhi harga lindung nilai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi, sangat penting untuk memberi sinyal kepada investor atau publik lewat putusan manajemen.

(Darmawan, 2019) menjelaskan bahwa informasi akuntan publik menandakan bahwa perusahaan sedang dalam proses *go public*. Sinyal yang baik adalah sinyal pengungkapan yang memadai yang tercermin dari kualitas laporan keuangan. Apabila manajemen memberitakan kabar baik, maka mampu menaikkan harga saham. Namun sebaliknya, apabila manajemen memberitakan kabar buruk dapat mengurangi harga saham perusahaan. Maka itu, manajer memiliki kewajiban untuk melaporkan perkembangan mengenai posisi perusahaan kepada para pengguna informasi. Tanda yang dilaporkan dapat berupa pemberitaan informasi seperti mempublikasikan laporan keuangan. Pimpinan melaporkan laporan keuangan untuk memberitakan informasi kepada pengguna informasi. Kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat terjadi pada para investor, apabila informasi yang diberitakan oleh manajemen perusahaan tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Sehingga terjadi asimetri informasi dimana pimpinan lebih superior menguasai informasi dibanding pihak lain. Untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi dalam *signaling theory*, manajemen dituntut untuk membentuk struktur pengendalian internal yang dapat melindungi aset perusahaan dan memastikan penyusunan laporan keuangan yang andal.

2.2 Teori Variabel

2.2.1 Tax Avoidance

Penghindaran pajak yang mengacu pada (Rosalia & Sapari, 2017) diartikan sebagai pengurangan pajak eksplisit. Setidaknya ada tiga hal yang harus

diperhatikan bagi manajer dalam perencanaan pajak, antara lain tidak melanggar aturan perpajakan, usaha yang sehat, bukti yang memadai dalam tindakan perencanaan pajak (Suandy, 2017). Berdasarkan penjabaran (Jasmine, Zirman, & Paulus, 2017) *tax avoidance* ialah upaya dalam pengurangan dengan cara yang legal dan dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai ketentuan di bidang perpajakan dengan secara maksimal.

2.2.2 Corporate Governance

2.2.2.1 Pengertian *Corporate Governance*

(Rosalia & Sapari, 2017) Penafsiran istilah "tata kelola perusahaan" pertama kali diberikan oleh Komisi Cadbury, Inggris (1992), yang mengenakan istilah itu dalam laporan lalu dikenal sebagai Laporan Cadbury. Komite Cadbury Inggris dalam (Rosalia & Sapari, 2017), "Selengkap aturan yang mendefinisikan kaitan antar pemegang saham, pemerintah, kreditur, manajer, pegawai dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban mereka, atau sistem dimana perusahaan dikelola dan dikendalikan". (FCGI, 2006) dalam (Rosalia & Sapari, 2017) tidak memberikan definisi tersendiri, melainkan mengadopsi definisi dari Cadbury Committee di Inggris yang bila diterjemahkan berbunyi: "... hubungan antar pemegang saham, pengurus atau pengurus perusahaan, kreditur, pemerintah, pegawai, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya; atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan". Tata kelola perusahaan seolah-olah memberikan

keyakinan dan kepastian kepada investor bahwa dana yang telah mereka tanamkan pada perusahaan telah digunakan dengan baik dan efektif serta bahwa tujuan dari perusahaan yang telah ditetapkan ini dapat tergapai, yakni dengan meningkatkan kekayaan pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan mengarah pada terbentuknya rivalitas yang sehat dan lingkungan bisnis yang kondusif. Elemen internal perusahaan berperan sebagai alat yang mengawasi dan melakukan kontrol peran manajemen dalam kinerja kegiatannya. Ini termasuk pemegang saham, manajer, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit serta pegawai. Kemudian pengendalian di luar perusahaan juga dapat dijadikan acuan dalam kinerja manajemen perusahaan, misalnya investor, akuntan, peraturan serta instrumen hukum lainnya.

(Utami & Syafiqurrahman, 2018) mengungkapkan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi permasalahan keagenan dimana manajemen cenderung oportunistik atau egois untuk mengurangi risiko informasi yang diperoleh pemegang saham.

2.2.2.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Berikut prinsip *Good Corporate Governance* menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dalam (Rosalia & Sapari, 2017) :

1. Transparasi

Pengelolaan sebuah perusahaan dengan cara terbuka dengan seluruh individu yang berpartisipasi atau tidak terlibat langsung dengan operasional perusahaan. Para pengelola perusahaan wajib berlaku secara terbuka kepada

penanam saham, jujur dan apa adanya dalam pembuatan laporan usaha serta tidak manipulatif. Keterbukaan informasi dalam mengambil keputusan dan pemberitaan informasi dianggap relevan dan penting.

2. Akuntabilitas

Fungsi, strukturisasi, sistem dan pertanggung jawaban yang jelas dalam perusahaan sehingga dalam mengelola perusahaan terlaksana dengan efektif dan efisien. Manajemen harus membuat uraian tanggung jawab pekerjaan yang jelas kepada karyawannya dan menegaskan fungsi dari setiap bagiannya. Dengan begitu perusahaan memiliki hak dan kewajiban yang jelas, serta tanggung jawab dan wewenang dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus memperhatikan hal-hal diluar perusahaan, seperti keamanan lingkungan, amdal serta kesesuaian diri dengan peraturan norma yang berlaku di sekitar. Perusahaan diharuskan untuk proaktif dan apresiatif terhadap setiap gejala masyarakat sosial serta yang berkembang disekitar masyarakat karena perusahaan berdampak pada lingkungan dan masyarakat pada umumnya.

4. Independensi

Independensi ialah berjalan bersama masyarakat setempat. Perusahaan wajib mempunyai otonominya secara utuh sehingga pengambilan keputusan dilakukan dengan penuh pertimbangan otoritas. Perusahaan berjalan dengan keuntungan agar mampu menjaga keberhasilan usahanya, semuanya harus memperoleh keuntungan dan tidak ada yang merasa rugi.

5. Kesetaraan

Tindakan yang adil dalam mencukupi hal dan kewajibannya kepada pemangku kepentingan yang berlandaskan aturan dan perjanjian yang berlaku. Perusahaan harus mempunyai sistem yang solid untuk pekerjaannya. Pekerjaan yang adil diharapkan semua aturan yang ditetapkan dipatuhi untuk melindungi setiap orang yang memiliki kepentingan terhadap berlangsungnya usaha. Terbentuknya dewan komisaris dan komite audit ialah salah satu bentuk penerapan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik guna meningkatkan keahlian dan keakuratan informasi keuangan yang dipergunakan oleh investor dalam mengambil keputusan berinvestasi.

2.2.2.3 Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Peraturan Menteri Negara BUMN No: PER01/MBU/2011 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Terbuka, diketahui bahwa tujuan penerapan prinsip, sebagai berikut:

1. Menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis yang baik untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga perusahaan memiliki daya saing domestik dan internasional yang kuat sehingga perusahaan mempertahankan eksistensi dan keberlanjutannya untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan publik.
2. Mendukung pengelolaan Badan Usaha Milik Negara secara efisien, profesional serta memanfaatkan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero dan Perum.

3. Mendukung Organ Persero dan Perum dalam mengambil keputusan dan melaksanakan tindakan berdasarkan nilai moral yang tinggi serta patuh terhadap aturan undang-undang, dan sadar akan tanggung jawab sosial Badan Usaha Milik Negara terhadap pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan sekitar Badan Usaha Milik Negara.
4. Melakukan peningkatan peran serta perekonomian nasional oleh Badan Usaha Milik Negara.
5. Melakukan peningkatan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.2.2.4 Teori-teori yang Berhubungan dengan *Corporate Governance*

Adapun teori berkaitan dengan *corporate governance* menurut (Rosalia & Sapari, 2017) antara lain:

1. *Agency Theory*

Teori Keagenan menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara pihak yang mewakilkan keputusan tertentu dengan pihak yang menerima perwakilan (agen/direksi/manajemen). Didalam teori keagenan ada beberapa asumsi dasar yaitu:

- a. *Agency conflict*, ialah konflik yang muncul akibat manajemen yang mementingkan diri sendiri dapat mengorbankan kepentingan pemegang saham untuk mencapai keuntungan dan nilai jangka panjang bagi bisnis.

b. *Agency problem*, ialah dihasilkan dari kesenjangan antara kepentingan pemegang saham sebagai pemilik dan kepentingan manajemen sebagai pengelola.

2. *Stewardship Theory*

Stewardship Theory khususnya penyelarasan antara pemilik modal dan manajer modal untuk mencapai tujuan bersama, tetapi secara implisit menggambarkan bagaimana akuntansi menetapkan dasar kepemimpinan dan hubungan antara pemegang saham dan manajemen, atau antara manajemen senior dan pemimpin tingkat bawah lainnya dalam organisasi perusahaan. Teori manajemen dapat dibangun diatas filosofi sifat manusia bahwa orang dapat dipercaya, mampu bertindak secara bertanggung-jawab, dengan integritas, dan jujur dengan orang lain.

2.2.3 Karakteristik Eksekutif

Perusahaan yang menghindari pajak tentu saja harus melalui kebijakan administrator perusahaan. Menurut (Karina & Jeksen, 2021) sebagai seorang pemimpin perusahaan yang memiliki pengalaman keahlian keuangan dalam perusahaan atau latar belakang keuangan dalam bekerja adalah manajer aktif yang memiliki lebih sedikit uang tunai, lebih banyak utang, dan terlibat dalam lebih banyak bagian pembelian kembali. Sejauh penghindaran pajak dapat dipandang sebagai peluang investasi cadangan. Usia pemimpin perusahaan dilihat dari berapa usia pimpinan perusahaan bekerja diperusahaan dan masa jabatan pimpinan perusahaan dipandang dengan lama masa jabatan pimpinan perusahaan dalam perusahaan (Doho & Santoso, 2020). Resiko perusahaan itu sendiri

menggambarkan prosedur yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Prosedur yang diambil dapat mengindikasikan seorang pemimpin memiliki ciri khas pengambil atau penghindar resiko (Oktamawati, 2017).

Resiko perusahaan memperlihatkan perilaku menyimpang. Tipe pimpinan pengambil risiko biasanya mempunyai keinginan dalam menghasilkan arus keuangan yang maksimal teruntuk tujuan pemilik perusahaan supaya memperoleh arus kas dari operasional perusahaan. Arus kas yang maksimal diperoleh dari kegiatan penghindaran pajak dengan meminimalisir bayar pajak. Maka itu manajemen dengan karakter pengambil risiko akan berusaha meningkatkan pendapatan perusahaan (Oktamawati, 2017).

(Pratama, Suprapti, & Anwar, 2019) menerangkan bahwa di dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pemimpin perusahaan dikatakan mempunyai dua ciri khas yaitu pengambil risiko dan penghindar risiko. Seorang eksekutif yang mempunyai sifat pengambil risiko yakni pemimpin tersebut lebih berani dalam pengambilan keputusan walaupun dengan risiko tinggi, kemudian pemimpin dengan sifat penghindar risiko yaitu pemimpin tidak berani memberikan keputusan dengan risiko tinggi. (Pratama et al., 2019) menjelaskan risiko perusahaan diukur dengan menghitung EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, depresiasi) dibagi dengan jumlah aset perusahaan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan saat ini untuk memperkuat konteks dan memperkuat landasan teori dari kajian-kajian teoritis. Berikut ini adalah deskripsi penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian ini:

Penelitian oleh (Sumantri, 2018) dengan judul “Tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian yang dilakukan menjelaskan Proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian tersebut menyimpulkan dengan nilai komite audit memiliki pengaruh dengan nilai signifikansi 0,018, sedangkan kepemilikan manajemen tidak memiliki pengaruh signifikan sebab nilai yang dihasilkan 0,149.

Selanjutnya penelitian dari (Nuradila & Wibowo, 2018) dengan judul “*Good Corporate Governance, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi auditor independen dan kualitas pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, pengaruh *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, kemudian ukuran pemeriksaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan memiliki efek negatif pada penghindaran pajak..

(Nurani, 2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan *Corporate Governance, Return On Asset, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*”. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari auditor independen, kualitas pemeriksaan, pengembalian aktiva dan *leverage* penghindaran pajak,

mengambarkan bahwa auditor independen berpengaruh negatif signifikan terhadap tidak membayar pajak. *Leverage* memiliki efek positif pada penghindaran pajak. Kualitas pemeriksaan dan pengembalian aset tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

(Pratama et al., 2019) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh karakteristik risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi: Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2017”. Tujuan studi untuk menganalisis pengaruh kepribadian eksekutif terhadap penghindaran pajak dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Subyek penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Pemilihan sampel penelitian menggunakan teknik *purported sampling* sehingga diperoleh 9 perusahaan yang memenuhi kriteria solstice. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi sedang. Hasil yang diperoleh adalah bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017. Variabel regulator adalah regulator independen yang merinci hubungan antara eksekutif dan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, Dewi, & Fajri, 2020) dengan judul “Pengaruh Corporate Governance dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2014-2018” berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa, kepemilikan institusional berpengaruh pada *tax avoidance*, hal ini dikarenakan semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin kecil kesempatan untuk melakukan *tax avoidance*. Sedangkan dewan komisaris

berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan dengan minat memaksimalkan laba yang berimplikasi pada pengurangan beban pajak maka manajemen memungkinkan melakukan *tax avoidance*. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, dikarenakan berdasarkan *agency theory* yang memiliki pengertian adanya hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) sehingga jika dikaitkan dengan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* adalah apabila dalam perusahaan memiliki hubungan yang baik antara manajer dengan direksi atau komisaris maka dapat dimungkinkan bahwa manajer tidak akan melakukan *tax avoidance*. *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dikarenakan *sales growth* yang baik di dalam suatu perusahaan akan membuat ukuran perusahaan semakin besar. Semakin besarnya ukuran perusahaan akan semakin membuat total aset di dalam perusahaan semakin besar pula. Keadaan ini akan membuat perusahaan sulit dalam melakukan *tax saving* melalui *tax planning* perusahaan.

Melalui penelitian yang dilakukan oleh (Haposan Banjarnahor, Agus Defri Yando, 2018) mendapatkan hasil yakni kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kondisi ini terjadi karena kepemilikan institusional banyak berperan di luar manajemen perusahaan, sehingga kebijakan manajemen seperti manajemen laba kurang dapat dipengaruhi oleh kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Manajer mempunyai kesempatan dalam melakukan manipulasi laba baik dalam bentuk menaikkan laba maupun menurunkan laba demi kepentingan tersebut. Hal ini akibat adanya ketimpangan informasi yaitu kondisi dimana satu pihak, yaitu

pihak manajemen atau internal memiliki kelebihan informasi dibandingkan dengan pihak lain. Sehingga semakin tinggi kepemilikan manajerial semakin tinggi pula kemungkinan dalam melakukan manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, kondisi ini terjadi dikarenakan bahwa komisaris independen yang merupakan bagian dari keanggotaan komisaris dalam perseroan tidak melakukan fungsi pengawasan secara baik terhadap manajemen. Sehingga kemungkinan manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen tidak dapat dikendalikan oleh jumlah anggota komisaris independen yang ada. Komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kondisi ini terjadi karena pengangkatan komite audit oleh perusahaan hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan *good corporate governance* di perusahaan. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit secara simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengaruh mekanisme *good corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris secara bersama-sama terhadap manajemen laba.

Menurut (Muttaqin, Husen, Ak, & Si, 2020) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh *Financial Distress*, Karakteristik Eksekutif, dan Kompensasi Eksekutif terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi periode 2016-2018. Hasil penelitian membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2018, karakteristik eksekutif berpengaruh

positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2018, dan kompensasi eksekutif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2018.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliandana, 2021) yakni tentang Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI menjelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin rendah nilai perusahaan. Batasan dalam penelitian ini adalah tidak memasukkan unsur variabel lain di luar penghindaran pajak yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

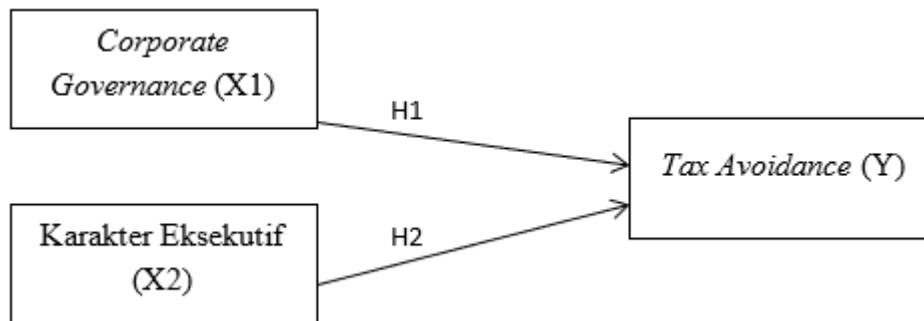
(Wayan Kartana dan Ni Gusti Agung Sri Wulandari, 2018) melalui penelitiannya yang berjudul Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia) menyatakan bahwa variabel karakter eksekutif dan *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel karakteristik perusahaan terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

(Siti Febiana Kurnia Devi, Erna Sudarmawanti, 2020) melakukan penelitian berjudul *Pengaruh Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* cenderung berpengaruh

negative terhadap *tax avoidance* dan kontribusi masing-masing variabel terhadap upaya melakukan *tax avoidance* juga kecil hanya 19,4 %, artinya semakin baik tata kelola perusahaan maka kemungkinan terjadinya *tax avoidance* semakin kecil. Perlunya peningkatan fungsi dan peran komite audit dalam membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan sehingga dilakukan pelaporan pajak yang wajar guna meminimalisir terjadinya *tax avoidance*.

(Sulhendri & Nita Wulandari, 2020) melakukan penelitian berjudul Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada perusahaan Manufaktur Sektor Automotive yang Terdaftar di BEI tahun 2015-2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap *tax avoidance*, komisaris independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, komite audit berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, kualitas audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber: Olahan Data Peneliti (2022)

2.5 Hipotesis penelitian

Hipotesis ialah tanggapan terhadap rumusan masalah yang diajukan ke bentuk pertanyaan. Ini bersifat sementara sebab tanggapan yang diberikan berlandaskan teori yang selaras dan bukan pada data empiris yang didapat dari pengumpulan data.

Hipotesis pada penelitian ini berdasarkan kerangka pikir, yaitu:

H_o^1 : Tidak ada pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

H_a^1 : Terdapat pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

H_o^2 : Tidak terdapat pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *tax avoidance*.

H_a^2 : Terdapat pengaruh Karakter Eksekutif terhadap *tax avoidance*.

H_o^3 : Tidak terdapat pengaruh *corporate governance* dan Karakter Eksekutif terhadap *tax avoidance*.

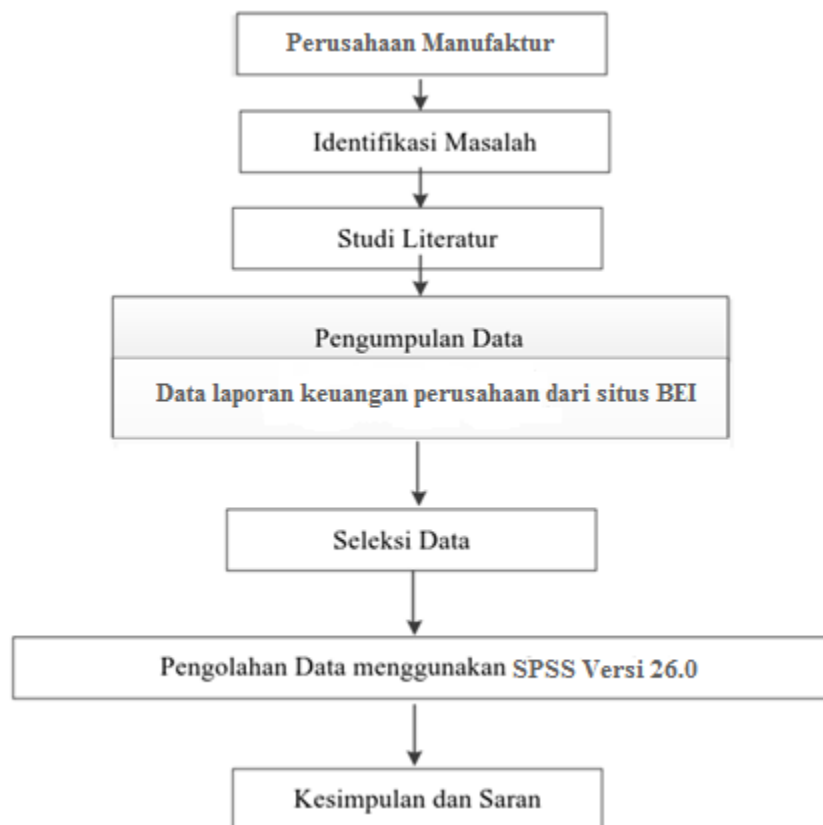
H_a^3 : Terdapat pengaruh *corporate governance* dan Karakter Eksekutif terhadap *tax avoidance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif, karena menggambarkan variabel yang diteliti dan membuktikan hubungan antar variabel yang diteliti. Desain penelitian adalah:



Gambar 3.1 Desain Penelitian
Sumber: Olahan Data Peneliti (2022)

3.2 Operasional Variabel

Studi ini, sesuai dengan judul yaitu pengaruh *corporate governance* (X1) dan karakteristik eksekutif (X2), terhadap *tax avoidance* (Y), maka variabel dikelompokkan menjadi dua variabel, yaitu:

3.2.1 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel ini sering disebut variabel stimulus, prediktor, dan prevarian. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel bebas. Variabel bebas ialah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan terjadinya variabel terikat (Sugiyono, 2017). Oleh karena itu, Variabel yang dipakai dalam penelitian ini meliputi dua variabel dengan simbol (X), yang dapat digambarkan sebagai berikut:

3.2.1.1 *Corporate Governance* (X1)

(Astuti et al., 2020) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan adalah tata kelola perusahaan yang menunjukkan keterkaitan antara pemangku kepentingan yang berbeda dalam perusahaan yang menentukan arah operasi perusahaan. *Corporate governance* dapat meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham, kesimpulannya adalah semakin baik perusahaan menerapkan mekanisme *corporate governance* maka semakin besar nilai tambah. Dalam studi ini, tata kelola perusahaan diukur dengan dua proxy, ialah auditor independen dan komite audit. Keterwakilan komposisi auditor independen diukur sebagai persentase

jumlah auditor independen relatif terhadap jumlah total auditor pada komposisi komite audit perusahaan dalam sampel yang diamati dalam satu tahun. *Corporate governance* dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$$

Rumus 3.1 Komisaris Independen

Sumber: (Astuti et al., 2020)

3.2.1.2 Karakteristik Eksekutif (X2)

Kepribadian eksekutif adalah kepribadian seorang pemimpin bisnis dengan karakteristik berani mengambil risiko atau menghindari risiko. Kepribadian eksekutif diukur dari risiko perusahaan yaitu adanya standar deviasi dari profitabilitas perusahaan, baik yang direncanakan maupun yang kurang matang (Oktamawati, 2017). Risiko suatu perusahaan diukur dengan standar deviasi EBITDA (Laba Sebelum Pajak, Penyusutan dan Amortisasi) dibagi dengan total aset perusahaan (Oktamawati, 2017). Adapun rumus menentukan karakter eksekutif adalah:

$$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^T (E - 1/T \sum_{t=1}^T E)^2}{T-1}}$$

Rumus 3.2 RISK

Sumber: (Oktamawati, 2017)

Nilai risiko perusahaan menggambarkan apakah manajer perusahaan adalah pengambil risiko atau penghindar risiko.

3.2.2 Variabel Terikat (*Dependen Variable*)

Rumus untuk menghitung *Cash Effective Tax Rate* dalam (Kevin Honggo & Aan Marlinah, 2019) adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Rumus 3.3 Cash Effective Tax Rate

Sumber: (Kevin Honggo & Aan Marlinah, 2019)

Variabel yang dipakai pada studi ini adalah satu variable dependen yaitu *tax avoidance* (Y). Studi ini menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* dikarenakan untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayar dengan tujuan keuntungan pribadi dengan upaya yang tidak melanggar aturan.

Tabel 3.1Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	<i>Corporate Governance</i> (X1)	Tata kelola perusahaan ialah tata kelola perusahaan yang menunjukkan hubungan antara berbagai aktor dalam perusahaan yang menentukan arah operasi perusahaan.	<i>Komisaris Independen</i> = $\frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Komisaris}}$ (Astuti et al., 2020)	Rasio

2	Karakteristik Eksekutif (X2)	<p>Karakter eksekutif adalah kepribadian seorang wirausaha yang bercirikan sebagai pengambil risiko atau penghindar risiko. Kepribadian eksekutif diukur dengan menggunakan risiko perusahaan itu sendiri, yaitu adanya penyimpangan atau standar deviasi dari pengembalian yang direncanakan atau kurang diharapkan perusahaan.</p>	$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^T (E - 1/T \sum_{t=1}^T E)^2}{T-1}}$ <p>(Oktamawati, 2017)</p>	Rasio
---	------------------------------	--	---	-------

3	<i>Tax Avoidance</i> (Y)	<i>Tax Avoidance</i> adalah upaya penghindaran pajak yang pakai secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar dengan aturan perpajakan, dimana teknik yang dipakai kearah mempergunakan kelemahan yang ada dalam perundangan dan aturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.	<i>Cash ETR</i> $= \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Kevin Honggo & Aan Marlinah, 2019)	Rasio
---	--------------------------	---	--	-------

Sumber: Olahan Data Peneliti (2022)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi ialah keseluruhan yang terdiri dari objek atau subyek dengan kualitas dan ciri khas tertentu yang ditentukan guna diteliti dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017). Studi ini menggunakan populasi perusahaan manufaktur sub sector makanan dan minuman yang mempunyai kontribusi relatif tinggi terhadap ekonomi di Indoensia. Populasi yang didapatkan sebanyak 26 perusahaan. Periode pengamatan pada tahun 2017-2021.

Populasi perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi :

1. PT Tri Banyan Tirta Tbk.
2. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
3. PT Akasha Wira International
4. PT Budi Starch & Sweetener Tbk.
5. PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk.
6. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
7. PT Delta Djakarta Tbk.
8. PT Inti Agri Resources Tbk.
9. PT Indofood CBP Sukses makmur.
10. PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
11. PT Multi Bintang Indonesia Tbk.
12. PT Magna Investama Mandiri Tbk
13. PT Mayora Indah Tbk
14. PT Prasadha Aneka Niaga Tbk.

15. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
16. PT Sekar Laut Tbk
17. PT Sekar Bumi Tbk.
18. PT Siantar Tbk.
19. PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk.
20. PT Sariguna Primatirta Tbk.
21. PT Campina Ice Cream Industry Tbk.
22. PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.
23. PT Buyung Poetra Sembada Tbk.
24. PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk.
25. PT Prima Cakrawala Abadi Tbk.
26. PT Sentra Food Indonesia Tbk.

Sumber: www.idx.co.id

3.3.2 Sampel

Studi ini dengan teknik purposive sampling yang merupakan sampel dengan kriteria yang ditentukan. Sugiono (2017) menggambarkan pengambilan sampel yang tidak dijanjikan sebagai sampel yang tidak merelakan peluang untuk setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Alasan pemilihan model dengan desain dikarenakan tidak semua sampel memenuhi kriteria yang diinginkan. Maka itu, hanya beberapa perusahaan yang memenuhi kriteria. Kriteria pemilihan sampel adalah:

1. Perusahaan manufaktur dengan laporan keuangan publikasi yang lengkap pada tahun 2017-2021.
2. Perusahaan manufaktur yang secara lengkap data mengenai semua variabel *corporate governance* dan karakteristik eksekutif yang diperlukan selama tahun penelitian.
3. Perusahaan manufaktur dengan laporan keuangannya menggunakan mata uang rupiah.

Dari semua kriteria yang ditentukan diatas dapat dipilih beberapa perusahaan yang dijadikan sampel yaitu :

1. PT Tri Banyan Tirta Tbk.
2. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
3. PT Delta Djakarta Tbk.
4. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
5. PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
6. PT Multi Bintang Indonesia Tbk.
7. PT Mayora Indah Tbk.
8. PT Nippon Indosari Copindo Tbk.
9. PT Sekar Bumi Tbk.
10. PT Sekar Laut Tbk.
11. PT Siantar Top Tbk.
12. PT Ultrajaya Milk Industry Tbk.

Sumber: www.idx.co.id

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam pencarian ini ialah data kuantitatif, yaitu data dalam angka menampilkan nilai variabel yang ditampilkan dan kemudian diuji dengan analisis data.

Sumber data terangkai merupakan sumber sekunder. Sumber data ialah sumber data yang diberikan secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017). Sumber data yang dipergunakan yaitu laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021 yang diakses dari alamat www.idx.co.id.

3.5 Metode Analisis Data

Analisa data ialah menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih sederhana lagi. Data yang terkumpul dengan membandingkan antara data yang diperoleh dari lapangan dengan kepustakaan, selanjutnya melakukan analisa lanjut untuk mendapati kesimpulan.

Sugiyono (2017) mendefinisikan analisis data sebagai aktivitas setelah mengambil semua data. Aktivitas analisis data meliputi pembentukan kelompok data menurut variabel dan jenis responden, tabulasi data menurut variabel seluruh responden, data disajikan untuk variabel yang diteliti, memperhitungkan untuk menjawab masalah dan melakukan perhitungan untuk susulan hipotesis.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif diuji untuk mencari tahu keberadaan variabel bebas dalam satu atau beberapa variabel tanpa membandingkan variabel itu sendiri dan mencari variabel lain (Sugiyono, 2017). Analisis deskriptif ialah analisis yang digunakan untuk pembahasan kuantitatif, yaitu analisa penelitian rasio nilai atau kuantitas variabel X terhadap variabel Y. Analisis yang dipakai adalah nilai terbesar, nilai terkecil, terbaik dan rata-rata.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berguna untuk melihat bagaimana data dari setiap variabel memenuhi ketentuan untuk menganalisis sehingga hipotesis dapat terjawab. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 uji yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Uji ini merupakan uji tentang normal tidaknya distribusi sebuah data. Tujuannya untuk mengetahui apakah model regresi variabel dependen dan independen secara normal. Selain itu, juga bertujuan guna mencari tahu besar data yang terdistribusi normal dalam variabel penelitian. Uji normalitas yang dipakai dengan menggunakan grafik histogram, grafik normal *P-Plot* dan *Kolmogrov-smirnov*.

Sebuah data diakui terdistribusi normal jika sesuai dengan kriteria ini:

1. Nilai signifikansi $> 0,05$ = data terdistribusi normal.
2. Nilai signifikansi $< 0,05$ = data tidak terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menemukan model yang telah didapati adanya korelasi antara variabel bebas. Apabila ada korelasi maka masalah multikolinieritas ditentukan. Model regresi yang baik tidak memiliki korelasi divi independen. Jika memiliki banyak transformasi, salah satu variabel independen diusir dari model, kemudian buat model regresi. Kriteria terjadinya multikolinieritas dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* dan nilai toleransi. Apabila nilai *Variance Inflation Factor* $< 10,00$, dan nilai toleransi yang diperoleh $> 0,10$ artinya model regresi terbebas dari multikolinieritas atau tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji Heteroskedastistas

Pengujian ini guna mencari tahu model regresi terjadi ketidaksamaan variabel residual pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Apabila terjadi signifikansi korelasi $> 0,05$ artinya model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

4. Uji Auto Korelasi

Uji ini berfungsi untuk mengukur ada atau tidaknya kaitan antara variabel pengganggu pada periode tahun berjalan dengan periode sebelumnya. Uji dilakukan dengan *Durbin-Watson* untuk menentukannya.

3.5.3 Analisis Linier Berganda

Analisis ini dilakukan dengan software SPSS, guna mencari tahu terjadinya pengaruh signifikansi dari variabel independen terhadap dependen maka

menggunakan model regresi linear berganda. Sugiyono (2017: 269) merumuskan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3$$

Rumus 3.4 Analisis Regresi Linier Berganda
Sumber: Sugiyono (2017)

Keterangan:

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan

a = Konstanta, nilai Y bila X=0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Jila b (+) maka naik, jika b (-) maka terjadi penurunan.

X= Subyek variabel independen dengan nilai tertentu.

3.5.4 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu hipotesis tentang jawaban sementara tentang sesuatu. Pengujian ini peneliti menguji signifikansi dengan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha). (Sugiyono, 2017) menjelaskan bahwa hipotesis adalah tanggapan sementara terhadap rumusan masalah yang dirumuskan menjadi sejumlah pertanyaan..

H0 ialah hipotesis yang menjelaskan bahwa tidak terjadi pengaruh signifikan antar variabel independen dengan variabel dependen, sedangkan Ha

ialah hipotesis yang menunjukkan terjadi pengaruh signifikan antar variabel independen dengan variabel dependen.

1. Uji T

Sebutan lain dari Uji T adalah signifikan individual. Pengujian ini membuktikan seberapa jauh keterpengaruhannya variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Ciri diterima atau ditolaknya H_0 dengan tingkat kesalahan 5%. Apabila signifikansi $>0,05$ artinya H_0 diterima, dan sebaliknya apabila signifikansi $<0,05$ artinya ditolak.

Jika H_0 diterima, berarti pengaruh variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan penolakan H_0 membuktikan bahwa terdapat pengaruh parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji F

Uji ini untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun ciri yang digunakan dengan tingkat signifikan sebesar 5% yaitu: Apabila nilai signifikansi $H_0 >0,05$ artinya diterima, dan apabila nilai signifikansi $H_0 <0,05$ artinya ditolak.

Pengambilan H_0 berarti terdapat pengaruh simultan variabel independen yang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, dan sebaliknya apabila H_0 ditolak membuktikan bahwa ada pengaruh simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Studi ini dilaksanakan di perusahaan Bursa Efek Indonesia dari bulan Maret 2022 - Juli 2022. Berikut jadwal kegiatan studi:

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Pengajuan Judul					
2	Pencarian Jurnal					
3	Pendahuluan					
4	Tinjauan Pustaka					
5	Pengumpulan Data					
6	Pengolahan Data					
7	Analisis dan Pembahasan					
8	Simpulan dan Saran					

Sumber: Olahan Data Peneliti (2022)